ACEH DAN SYARIAT ISLAM

Ali Geno Berutu
ali_geno@ymail.com

Prof. Dr. Azumardi Azra, MA
Beserta Tim Dosen

SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF
HIDAYATULLAH JAKARTA
2014 M/1435 H

Abstrak

Aspirasi umat Islam di Indonesia untuk menerapkan syariah Islam sebenarnya tidak pernah sirna dari waktu ke waktu. Bahkan selepas era Soeharto yang represif, aspirasi umat itu makin bergelora. Sebagai bukti misalnya, setelah berlaku UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah beberapa bagian syariah Islam mulai diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Selain di propinsi Aceh, sebagian elemen syariah diformalisasikan melalui peraturan daerah di beberapa propinsi lain, seperti di Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur), Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur (Kabupaten Pamekasan).

ACEH DAN SYARIAT ISLAM

A. Pendahuluan

Dalam perspektif perubahan dan masyarakat paska-kolonial, maka munculnya tuntutan pemberlakuan hukum syari'ah itu di satu sisi merupakan bagian dari tuntutan hak atas budaya sendiri dalam kerangka dominasi budaya modern Barat. Ia merupakan kelanjutan historis dari tuntutan kemerdekaan, nasionalisme, dan pertarungan ideologi di masa lalu. Pertarungan itu kini tidak hanya dalam kerangka berbasiskan ideologi Islam atau Timur-Barat yang abstrak melainkan juga sistem yang terbangun di negara sendiri atau domestik bentukan masa lalu dimana Barat merupakan unsur dominan.¹

Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun demikian, hukum Islam telah mengalami perkembangan secara

¹ Ahmad Suaedy, *Syariat Islam dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*, The 9th Conference of The Asia Pacific Sociological Association, Improving the Quality of Social Life: A Challenge for Sociology, June 13 – 15, 2009, Discovery Kartika Plaza, Kuta, Bali, Indonesia. h 2.

berkesinambungan. baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya itu².

Aspirasi umat Islam di Indonesia untuk menerapkan syariah Islam sebenarnya tidak pernah sirna dari waktu ke waktu. Bahkan selepas era Soeharto yang represif, aspirasi umat itu makin bergelora. Sebagai bukti misalnya, setelah berlaku UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah beberapa bagian syariah Islam mulai diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Selain di propinsi Aceh, sebagian elemen syariah diformalisasikan melalui peraturan daerah di beberapa propinsi lain, seperti di Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur), Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur (Kabupaten Pamekasan)³.

Sejarah Aceh dan Indonesia telah menempatkan masyarakat Serambi Mekkah ini pada posisi yang khas, dan kekhasan tersebut lebih-lebih lagi dalam soal agama. Syari'at Islam bagi masyarakat Aceh adalah bagian tidak terpisahkan dari adat dan budayanya. Hampir seluruh tatanan kehidupan keseharian masyarakat diukur dengan standar ajaran Islam, dalam artian merujuk pada keyakinan keagamaan, walaupun mungkin dengan pemahaman-pemahaman atau interpretasi yang tidak selalu tepat dan relevan. Di sinilah letak muatan psikologis petingnya penerapan "syari'at Islam" bagi masyarakat Muslim. Dan ini juga yang menjadi bagian dari alasan mengapa penerapan syari'at Islam di Aceh akan sangat menentukan masa depan daerah ini.⁴

Dalam Islam, syariah ("cara" atau "jalan") sering diartikan sebagai seperangkat standar yang mengatur semua aspek kehidupan, dari kepatuhan agama, perbankan, hingga tingkah laku sosial yang selayaknya, yang pada intinya bersumber dari Quran, kitab utama agama Islam, dan hadis, kumpulan peribahasa dan penjelasan tentang sunah, atau teladan dan aturan normatif, dari Nabi Muhammad. Tetapi, tidak ada penafsiran tunggal atas Syariah di antara umat Muslim di seluruh dunia: terdapat berbagai perbedaan dalam penafsiran para ahli Islam tentang teladan kenabian yang mana yang asli dan keabsahan atau kelayakan menerapkan ayat-ayat tertentu secara harafiah di era

² Didi Kurnadi, kertas dibaca pada artikel pdf, *Hukum Islam Di Indonesia: Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum*, h.1.

³ Muhammad Ismail Yusanto, Kertas di baca pada, *Penerapan syariat Islam di Indonesia: Tantangan dan Agenda*, h.1.

⁴ Nurjannah Ismail, *Syari'at Islam dan Keadilan Gender*, First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies, h.6 .

modern ini. Pada awal tahun 1999, Pemerintah Indonesia dan Aceh mengadopsi pendekatan penerapan syariah yang menekankan pada tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa semua orang memenuhi kewajiban agamanya yang berasal dari Islam.⁵

Reformasi membuka jalan bagi masyarakat Aceh untuk kembali menuntut pemberlakuan syariat Islam,⁶ sesuai dengan keistimewaan Aceh. Pemerintah Pusat merespon berbagai tuntutan itu dengan mengundang Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pelaksanaansyariat Islam memperoleh dasar hukum pasca reformasi tahun 1998. Tepatnya tahun 2001, melalui UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 4 Oktober 1999 dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nangroe Aceh Darussalam ditetapkan tanggal 9 Agustus 2001.⁷ Serta UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disingkat dengan UUPA) diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam konteks politik hukum, berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan hukum ke arah hukum yang baru pasca lahirnya undang-undang dimaksud, belum banyak dapat dihasilkan.⁸

B. Syariat Islam Dalam Tinjauan Sejarah di Aceh

Menurut Azumardi Azra⁹, Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia, kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan

⁵ Human Right Watch, *Menegakkan Moralitas, Pelanggaran Dalam Penegakan Syariat Islam di Aaceh, Indonesia*. h.17.

⁶ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syarit Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Alvabet, 2004), h.25.

⁷ Marzuki Abubakar, "Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial" *Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama*. h.152.

⁸ Saidurrahman, Annual Conference On Islamic Studies Banjarmasin, 1 – 4 November 2010 (ACIS) Ke – 10, *Siyasah Syar'iyah Di NAD: Sejak Kemerdekaan RI Hingga Lahirnya UU No: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*,h. 805.

⁹ Rusdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi, Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nangroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: Logos, 2003) xix-xxvi. Lihat Juag, Yuni Roslaili, *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia: Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di Nangroe Aceh Darussalam*, 110.

oleh Sultan Ali Mughayat Syah¹⁰ (916-936 H/ 1511-1530 M), adalah sebuah kerajaan yang ditegakkan atas asas-asas Islam. Dalam *Adat Mahkota Alam* yaitu UUD kerajaan Aceh Darussalam yang diciptakan atas arahan Sultan Iskandar Muda, misalnya disebutkan bahwa sumber hukum yang dipakai dalam negara adalah al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas.

Pada masa penjajahan Kolonial Belanda, Belanda menyerang Ibu Kota Kesultanan Aceh pada April 1873 dan berhasil menaklukkan kesultanan Aceh dengan pimpinan Sultan yang terakhir Muhammad Daud Syah (1874-1903)¹¹. Dengan ditaklukkannya Kuta Raja sebagai pusat kekuasaan kesultanan Aceh, Belanda memandang kesultanan Aceh telah berakhir dan para administrasi ditempatkan untuk mengambil alih posisi dan hak-haknya. Akan tetapi dalam pandangan masyarakat Aceh, mereka belum ditaklukkan dan perang masih berlanjut. Dalam hal ini ulama menjadi inspirator nyata dalam perjuangan Aceh dan bersama masyarakat terus melakukan perlawanan dan berpergian keseluruh Aceh, kawasan pesisir Kedah dan Penang¹² untuk mendakwahkan *Jihad fi@sabi@lilla@h*.

Setelah Indonesia merdeka tuntutan untuk menerapkan syariat Islam kembali muncul. Masyarakat Aceh yang sebelumnya telah menyatakan kepada Soekarno bahwa Aceh mau membantu dan bergabung dengan RI melawan penjajahan Belanda dengan catatan diberikan hak untuk melaksanakan syariat Islam menurut pelaksanaanya¹³. Tengku Daud Beureuh, tokoh pergerakan Aceh¹⁴ berkali-kali menuntut penerapan syariat Islam kepada presiden Soekarno dan pihak presiden hanya memberi janji-janji. Kegagalan Jakarta dalam memenuhi janjinya tidak hanya mengenai syari'at¹⁵.

¹⁰ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Ciputat: Pustaka Alvabet 2004), 13. Lihat Juga, Denis Lombard, Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda, 49.

¹¹ Yuni Roslaili, *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia, Analisis Kesusus Terhadap Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Disertasi SPS UIN Jakarta: 2009).116 .

¹² Antje Missbach, *Separatist Conflict In Indonesia: The long-distance of the Acehnese Diaspra*, (London ang Nouyork: Reutledge, 2012), 48.

¹³ Crisis Group, *Syari'at Islam dan Peradilan Pidana di Aceh*, Asia Report N°11 , 31 Juli 2006, 3.

¹⁴ Human Right Watch, *Menegakkan Moralitas*, <http://m.hrw.org/reports/2010/12/01/menegakkan-moralitas> (Daikses Pada tanggal 5 Mei 2014)

¹⁵ International Crisis Group, *Syariat Islam dalam Peradilan Pidana di aceh*, h,3.

Pada tahun 1951, dalam upaya pemerintahan baru untuk merampingkan administrasi dan menghemat biaya Aceh kehilangan statusnya sebagai sebuah propinsi yang berdiri sendiri dan dilebur Provinsi Sumatra Utara¹⁶.

Pada masa Orde Baru, pemerintah Soeharto mengeluarkan sebuah undang-undang tentang pemerintahan daerah. Lewat perundangan ini “keistimewaan” Aceh sebagai Daerah Istimewa terhapus dengan pemberlakuan sebuah struktur tunggal yang harus diadopsi oleh setiap tingkatan dalam pemerintahan setempat. Tak hanya itu, sumber wewenang tradisional pun runtuh karena struktur mereka terpaksa harus memberi jalan kepada sebuah birokrasi raksasa yang dijalankan oleh partai Golkar. Langkah ini yang menuju sebuah penyeragaman yang menindas kemudian dipertegas oleh undang-undang tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang mengambil seluruh sisa-sisa kekuasaan yang tadinya dimiliki oleh pemimpin adat. Setelah itu, isu syariat Islam seperti terkubur hingga undang-undang otonomi daerah disahkan tahun 1999.¹⁷

Presiden Soeharto melanjutkan kebijakan pendahulunya untuk memberikan Aceh status daerah Istimewa dan penerapan syariat Islam. Namun begitu janji tersebut tidak pernah dilaksanakan dengan sepenuhnya. Bahkan disisi lain, Soeharto memberikan kesempatan kepada perusahaan *multi nasional* dari Amerika Serikat untuk membuka industri besar di Aceh dibidang eksplorasi minyak dan gas bumi di Arun pada tahun 1970an¹⁸.

Pada masa reformasi Aceh kembali menuntut pemberlakuan syariat Islam, tuntutan *referendum* kepada Aceh mendominasi tuntutan pemberlakuan syariat Islam. Pemerintah Pusat merespon tuntutan ini dengan mengundangkan Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Juli 2001 dimasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Provinsi NAD dan mengatur lebih jauh Otonomi Khusus bagi NAD seperti adanya *Mahkamah Syaria*, *Qanun*, Lembaga Daerah, Zakat, Kepolisian Syariah, kepemimpinan adat dan lain-lain. Pada 9 Desember

¹⁶ Muhammad Umar, *Peradaban Aceh: Kilasan Sejarah Aceh dan Adat, Tamaddun I*, (Banda Aceh, Yayasan Busafat, 2006), 63.

¹⁷ International Crisis Group, *Syariat Islam dalam Peradilan Pidana di aceh*, h.5

¹⁸ Muhammad Umar, *Peradaban Aceh*, 65.

2002 terjadi kesepakatan penghentian kekerasan (*Cessation on Hostilities Agreement, CoHA*) yang ditandatangani di Jenewa. Tapi karena ketidak efesienan CoHA dalam memberhentikan pembrontakan, presiden Megawati melalui keputusan presiden No. 18 tahun 2003 kembali menerapkan status Darurat militer di Aceh. Gempa bumi dan Tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 memberikan pintu hikmah bagi masyarakat Aceh, pada tanggal 17 Juli 2005 kedua belah pihak (GAM-RI) bersepakat mengenai substansi dan redaksi yang tertuang pada MoU. Kesepakatan tersebut diikuti dengan penanda tanganan kesepakatan perdamaian antara pemerintahan RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 yang dikenal dengan MoU Helsinki.¹⁹

C. Lembaga-Lembaga Penegak Syariat Islam di Aceh

1. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU NAD merupakan penjabaran keistimewaan daerah Aceh di bidang Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah. Lembaga MPU ini sebagai pengganti lembaga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah ada sebelumnya. Menurut PERDA tersebut, lembaga MPU ini merupakan suatu badan yang independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD. MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD.²⁰

Sesuai dengan fungsinya, maka MPU bertugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan Daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah, maupun kepada masyarakat di daerah. Berkaitan dengan tata hubungan MPU dengan lembaga pemerintahan, telah lahir pula Qanun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya. Dalam Qanun tersebut secara konkrit ditegaskan tentang kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yakni : memberikan pertimbangan, saran/fatwa baik diminta maupun tidak

¹⁹ Yuni Roslaili, *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia*, . 126.

²⁰ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta : Alvabet, 2004), h.31.

diminta kepada Badan Eksekutif, Legislatif, Kepolisian Daerah NAD, Kejaksaan, KODAM dan lain-lain badan/Lembaga Pemerintah.²¹

2. Dinas Syariat Islam

Pembentukan Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional Pemerintah Daerah di bidang Pelaksanaan Syariat Islam sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999.²²

Dinas Syariat Islam adalah unsur pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur²³ dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Syariat Islam adalah melaksanakan tugas umum dan khusus²⁴ Pemerintah Daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab di bidang Pelaksanaan Syariat Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Syariat Islam menjalankan lima fungsi, yakni :

1. Perencanaan dan penyiapan qanun yang berhubungan dengan Syariat Islam;
2. Penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam;
3. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakkan syiar Islam;
4. Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam;
5. Bimbingan dan penyuluhan Syariat Islam.

Di antara program-program yang telah dilaksanakan Dinas Syariat Islam adalah : pengiriman da'i (pendakwah) ke daerah perbatasan dan terpencil, pembinaan Wilayatul Hisbah (WH) sebagai pengawas syariat, bantuan sarana peribadatan dan sarana peradilan (Mahkamah Syar'iyah). Khusus untuk lembaga Wilayatul Hisbah sejak tahun 2008 tidak lagi di bawah pembinaan Dinas Syari'at Islam, tetapi

²¹ Armia Ibrahim, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, [Http://Www.Ms-Aceh.Go.Id/Informasi-Umum/Artikel/120-Peraturan-Perundang-Undangan-Tentang-Pelaksanaan-Syariat-Islam-Di-Aceh.Html](http://Www.Ms-Aceh.Go.Id/Informasi-Umum/Artikel/120-Peraturan-Perundang-Undangan-Tentang-Pelaksanaan-Syariat-Islam-Di-Aceh.Html). (diakses pada tanggal 11 juni 2014).

²² Armia Ibrahim, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*.

²³ Perda No. 33 Tahun 2001, *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Di Nad*, Pasal 2 Ayat 1

²⁴ Pasal 3 Perda No. 33 Tahun 2001

telah bernaung di bawah suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersendiri yakni Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.²⁵

Di samping Dinas Syari'at Islam di tingkat Provinsi selaku perangkat Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur, maka di tingkat Kabupaten/Kota juga dibentuk lembaga yang sama yang merupakan perangkat pemerintahan Kabupaten/Kota yang berada di bawah Bupati/Walikota. Namun sampai saat ini lembaga pengemban tugas di bidang pelaksanaan syari'at Islam ini belum seragam baik namanya maupun struktur Organisasinya antara satu daerah Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Aceh.

6. Mahkamah Syari'ah (MS)

Pemerintah Pusat melalui Menteri Agama pada tanggal 4 Maret 2003 bertepatan dengan tahun baru 1424 H, telah meresmikan Mahkamah Syari'iyah (MS) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Mahkamah Syari'iyah itu sendiri merupakan pengganti Pengadilan Agama dengan telah mengalami perluasan dalam hal kewenangannya.²⁶

UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (selanjutnya UU PNAD) membawa perkembangan baru di Aceh dalam sistem peradilan. Pasal 25 – Pasal 26 UU PNAD mengatur mengenai Mahkamah Syari'iyah NAD yang merupakan peradilan syari'at Islam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Mahkamah Syari'ah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah PNAD yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.1 Kewenangan Mahkamah Syari'iyah selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Qanun PNAD. Qanun PNAD adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dari wewenang yang diberikan oleh UU No. 18 tahun 2001 untuk mengatur daerah dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Qanun.²⁷ Mahkamah Syari'ah tersebut terdiri dari:

²⁵ Armia Ibrahim, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*.

²⁶ Saidurrahman, "Siyasah Syari'iyah Di Nad, (Sejak Kemerdekaan Ri Hingga Lahirnya Uu No: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)", Annual Conference On Islamic Studies Banjarmasin, 1 – 4 November 2010 (Acis) Ke - 10 ,h .803.

²⁷ Lihat Penjelasan Umum UU PNAD. Asas *lex specialis derogat lex generalis* mempunyai arti bahwa peraturan yang khusus mengenyampingkan yang

1. Mahkamah Syari'ah Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda sebagai pengadilan tingkat pertama;
2. Mahkamah Syari'ah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berada di ibukota Provinsi, yaitu di Banda Aceh.

Sementara untuk tingkat kasasi tetap dilakukan di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24A UUD NRI 1945, yaitu Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.²⁸

Di bidang justisial Mahkamah Syar'iyah mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara antar orang Islam di bidang *al-ahwa@l alsyakhshiyah* (hukum keluarga), muamalah (perdata) dan jinayah (pidana) Pasal 49 Qanun No 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam²⁹. Perkara bidang *al-ahwa@l alsyakhshiyah* meliputi masalah perkawinan, kewarisan dan wasiat⁴⁹. Bidang muamalah antaranya meliputi masalah jual beli, utang-piutang, *qiradh* (permodalan), bagi hasil, pinjam meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewa menyewa, perburuhan. Untuk perkara *jinayah* termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan jenis hukuman *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*. Di bidang jinayah kita telah mempunyai tiga *qanun jinayah* yaitu:

1. Qanun No 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya.
2. Qanun No 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian).
3. Qanun No 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum).

4. Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayatul Hisbah (yang selanjutnya disebut WH) merupakan perangkat yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengawal dan mengontrol pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Keberadaannya diatur dengan qanun serta keputusan gubernur yang telah memberikan wewenang penuh kepada aparaturnya untuk menegakkan syariat ini untuk

umum. Perlu dipikirkan kembali sejauh mana atau batasan-batasan dari suatu qanun sehingga dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan lain.

²⁸ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 A.

²⁹ Ainal Hadi, *Hukum dan Fenomena Sosial*, Aceh Justice Resource Centre, h. 128.

melaksanakan seluruh proses pengawalan secara penuh dan tanpa ragu ragu.

Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat di Aceh, sebagaimana *entitas administratif* lainnya di Indonesia, dapat membentuk Satpol PP untuk menegakkan peraturan terkait dengan “ketertiban publik dan ketentraman masyarakat.”³⁰ UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) secara khusus memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah Aceh untuk membentuk unit WH yang bertanggung jawab menerapkan hukum Syariah sebagai bagian dari Satpol PP.³¹ Petugas-petugas Satpol PP lainnya sesekali mengadakan patroli dan operasi bersama dengan rekan-rekannya di WH.

Semua petugas WH memiliki wewenang untuk “menegur dan menasihati, memperingatkan, dan memberikan bimbingan moral” kepada orang-orang yang mereka curigai melanggar hukum Syariah di Aceh, memberitahu pihak berwenang yang sesuai tentang kemungkinan adanya pelanggaran hukum Syariah, dan memfasilitasi penyelesaian pelanggaran Syariah melalui tata cara atau hukum adat. Petugas WH yang telah diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki wewenang tambahan, yaitu menangkap dan menahan orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran Syariah tertentu, hingga 24 jam dan mengadakan penyelidikan seperti layaknya polisi atas dugaan pelanggaran Syariah, termasuk mendapatkan testimoni dari saksi mata dan memerintahkan pemeriksaan medis.³²

Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah*, yang secara resmi membentuk WH, mengatur peran WH sebagai sumber panduan dan nasihat *spiritual* bagi masyarakat Aceh.³³ Qanun Nomor 12 Tahun

³⁰ *Undang-undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 244(1). Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia telah membentuk Satpol PP. Mereka terpisah dari Kepolisian dan diberdayakan untuk menegakkan peraturan-peraturan administratif terkait ketertiban dan keamanan publik dan biasanya diberdayakan untuk mengumpulkan pajak daerah dan untuk menegakkan ketertiban publik setempat.

³¹ *Undang-undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 244(2). Walaupun pasukan WH Aceh awalnya dibentuk di bawah otoritas Dinas Syariat Islam, WH kemudian disatukan dengan Satpol PP.

³² Human Rights Watch, *Menegakkan Moralitas, Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia*. <http://www.hrw.org/fr/node/94464/section/6> (diakses pada tanggal 10 Juni 2014).

³³ Melalui memberitahu publik tentang *qanun* yang terkait dengan hukum Syariah; mengawasi kepatuhan atas hukum Syariah; menegur, memperingatkan dan memberikan bimbingan moral kepada mereka yang disangka melanggar hukum

2003 yang mengatur tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, memberikan wewenang kepada WH untuk memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkan laporannya kepada penyidik.³⁴ Perda ini tidak memberikan wewenang kepada petugas WH untuk menangkap tersangka, melainkan menyerahkan mereka kepada Kepolisian Daerah (Polda) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) jika perilaku mereka tidak berubah.³⁵

D. Syariat Islam Dalam Penerapannya

Pro-kontra penerapan syariat Islam di Aceh tidak semudah seperti apa yang dibayangkan, salah satunya karena masih adanya kontroversi di kalangan masyarakat Aceh sendiri³⁶. Munculnya polemik di level pemikiran para intelektual muda Aceh, merupakan realitas yang cukup positif bagi pencerdasan masyarakat Aceh untuk mendalami keberadaan Islam baik dalam tataran pemikiran maupun terapannya di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Keragaman pendapat justru membawa rahmat tersendiri sepanjang masih dapat saling menghargai perbedaan di antara masing-masing pandangan. Perbedaan pendapat menyangkut syariat Islam, sebenarnya tidak hanya terjadi di Aceh, secara umum perbedaan pandangan telah muncul di kalangan umat Islam. Hanya saja, karena Aceh yang notabene secara hukum diberikan status khusus, pro-kontra penerapan syariat Islam menjadi lebih mengemuka.

Dalam kaitan ini, perbedaan pendapat tentang penerapan syariat Islam, terfregmentasi dalam dua pandangan, yaitu kalangan moderat yang berpendapat bahwa syariat Islam tidak perlu diformalisasikan. Sedangkan kalangan konservatif melihat bahwa syariat Islam mutlak harus diformalisasikan. Dengan demikian, secara tidak langsung kedua pendapat tersebut memunculkan pertanyaan tentang perlu tidaknya penerapan syariat Islam melibatkan kekuasaan negara. Atau dengan

Syariah; berusaha menghentikan tindakan/perilaku yang dicurigai melanggar hukum Syariah; menangani pelanggaran-pelanggaran melalui proses adat; dan menyerahkan pelanggaran hukum Syariah kepada penyelidik pidana. UNDP Indonesia, "Akses terhadap Keadilan di Aceh," h. 48-50.

³⁴ Pasal 17 ayat 2 Qanun Nomor 12 Tahun 2003 *Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya*.

³⁵ Qanun Nomor 12 Tahun 2003, Pasal 17 ayat 3.

³⁶ Aulia Baihaqi, *Wajah Syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah*, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=29076> (diakses pada tanggal 11 Juni 2014).

kata lain, apakah negara turut campur untuk mengurus dan mengatur umat Islam dalam menjalankan syariatnya atau tidak.³⁷

Pelaksanaan Syari'at Islam diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah (Perda/Qanun) Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Dalam Bab II, tujuan dan Fungsi pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa: "*Keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini, pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing*"³⁸.

Syariat Islam yang dicanangkan berlaku di bumi Aceh pada tanggal 1 Muharram 1423 hijriyah adalah syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh/ sempurna). Timbul pertanyaan mengapa harus ditambah kata-kata "*kaffah*"?. Bukankah ketika kita berikrar melaksanakan syariat Islam berarti kita harus melaksanakan secara sempurna dan menyeluruh, meskipun tanpa menyebut kata-kata *kaffah* seperti tertera dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 208. Penyebutan kata-kata *kaffah* dianggap perlu dan penting secara politis, karena akan menentukan bagaimana peranan dan keterlibatan negara (Pemerintah Daerah) dalam upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dengan demikian terlaksananya syariat Islam di Aceh bukan hanya urusan pribadi pemeluk Agama Islam, tetapi telah menjadi tugas dan tanggung jawab Negara (Pemerintah Daerah).³⁹

Presiden BJ Habibie menandatangani UU Nomor 44 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang meliputi bidang agama, adat, pendidikan, dan peranan ulama. Penyelenggara kehidupan beragama di daerah ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya. syari'at Islam didefenisikan dengan tuntunan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan.⁴⁰ Menurut pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 ada empat bidang keistimewaan yang diberikan kepada Daerah Aceh, yaitu⁴¹

³⁷ Aulia Baihaqi, *Wajah Syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah*.

³⁸ Marzuki Abubakar, "Syariat Islam Di Aceh: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sos, Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama", h.157.

³⁹ Armia Ibrahim, *Peraturan Perundang Undangan Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, h. 1.

⁴⁰ Saidurrahman, *Siyasah Syar'iyah Di Nad (Sejak Kemerdekaan RI Hingga Lahirnya UU NO: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)*, Annual Conference on Islamic Studies Banjarmasin, 1 – 4 November 2010 (ACIS) Ke - 10 . h.7.

⁴¹ Armia Ibrahim, *Peraturan Perundang Undangan Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, h. 2.

1. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
2. Penyelenggaraan kehidupan adat;
3. Penyelenggaraan pendidikan, dan
4. Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah.

Sementara itu pada tanggal 9 Agustus 2001, Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani UU Nomor 18 Tahun 2001, yang lebih dikenal dengan UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam. Terlepas dari plus minusnya UU tersebut, yang terpenting mengenai penerapan Syariat Islam adalah membenarkan pembentukan Mahkamah Syar'iyah, baik pada tingkat rendah (Sagoe) ataupun tingkat tinggi (Nanggroe) yang wewenangnya dapat meliputi seluruh bidang syari'at yang berkaitan dengan peradilan. Kedudukan peradilan tersebut sama dengan tiga saudaranya yang lain, yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Administarsi Negara, yang pembinaan yudisialnya dilakukan oleh Mahkamah Agung.⁴²

Untuk penerapan UU tersebut, sudah ditetapkan Perda Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Perda Nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja MPU, Qanun Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan dan Tatakerja Dinas Syari'at Islam Propinsi Daerah Istiewa Aceh, Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan syari'at Islam. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, dan Qanun Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.⁴³

Saat ini pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih sebatas *lip service*, masih sibuk dengan kulit dan melupakan isi, karena pada umumnya masih sebatas razia jilbab terhadap kaum wanita, dan belum menyentuh subtansi dasar dari pelaksanaan syariat Islam itu sendiri secara kaffah. Masyarakat masih menunggu keseriusan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Maka sudah saatnya Qanun Jinayah seperti hukuman potong tangan buat koruptor diundangkan. Tentu ini menjadi lebih bermakna buat masyarakat. Nampaknya memang butuh kerja keras yang lebih padu dan lebih bersinergi lagi dari pihak-pihak yang terkait untuk penegakan syariat Islam di Aceh, walau masyarakat sendiri juga harus punya kesadaran juga tentang pentingnya penerapan syariat Islam ini, karena penegakan

⁴² Saidurrahman, *Siyasah Syar'iyah Di Nad* ,.h 8.

⁴³ Saidurrahman, *Siyasah Syar'iyah Di Nad* ,.h 8.

syariat Islam tidak hanya kewajiban Dinas Syariat Islam tapi juga kesadaran individu.⁴⁴

5. Kedudukan Syariat Islam Dalam Sistem Hukum Nasional

Indonesia adalah negara hukum, yaitu mendasarkan semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pada suatu hukum. Dalam suatu tatanan hukum tersebut terdapat suatu sistem hukum. Sistem hukum yang dianut di Indonesia merupakan *Mix Law System* yang mana di samping berlakunya hukum perundang-undangan juga berlaku hukum Islam.⁴⁵ Eksistensi hukum Islam termanifestasi di dalam Konstitusi Negara Indonesia yang lazim dikenal dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD ini merupakan hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara guna terwujudnya suatu pemerintahan yang adil dan rakyat yang sejahtera.⁴ Dalam kaitan kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi mengatur kehidupan beragama, yaitu sebagaimana tercantum pada alinea keempat pada Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁶

Dasar legislasi hukum Islam dalam UUD 1945 adalah pada pasal 29 ayat (1) dan Perubahannya. Hukum Islam merupakan sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia. Dalam Negara Republik Indonesia tidak dibenarkan terjadinya pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Islam bagi umat Islam, demikian juga bagi umat-umat agama lain, peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama-agama yang berlaku di Indonesia bagi umat masing-masing agama bersangkutan. Dalam Ketetapan MPR RI No. IV/MPR-RI/1999 tentang GBHN, Bab IV, Arah Kebijakan, A. Hukum, butir 2, ditetapkan bahwa

⁴⁴ Hamdani, *Apa Kabar Penerapan Syariat Islam di Aceh?*, <http://regional.kompasiana.com/2013/08/29/apa-kabar-penerapan-syariat-islam-di-aceh-584954.html>, (diakses pada tanggal 11 2014)

⁴⁵ Realitas hukum kita di Indonesia, memberlakukan beberapa hukum di Indonesia, yaitu: Hukum Perundang-undangan (*Ciri Eropa Continental*), Hukum Adat (*Customary Law*), Hukum Islam (*Moslem Law*), dan Yurisprudensi Hakim. Sehingga para pakar hukum modern memasukkan Indonesia ke dalam *Mix Law System* atau Sistem Hukum Campuran. Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undangundang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana: 2009), h. 204.

⁴⁶ Rasyid Rizani, *Kertas Dibaca Pada Kedudukan Qanun Jinayat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 1.

hukum Islam, hukum Adat, hukum Barat adalah sumber pembentukan hukum nasional. “Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui legislasi”.⁴⁷

Dasar hukum dan pengakuan Pemerintah untuk pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh, didasarkan atas UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 31 disebutkan:

- 1) Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Ketentuan Pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian Undang-undang menetapkan Qanun Provinsi sebagai peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang menjadi wewenang Pemerintah provinsi. Untuk membuat Qanun, Pemerintah Provinsi tidak perlu menunggu peraturan pemerintah atau peraturan lainnya dari Pemerintah Pusat.⁴⁸

Seluruh peraturan pidana, baik yang dimuat dalam KUHP maupun di luar KUHP berlaku di NAD. Namun, untuk tindak pidana/perbuatan pidana tertentu yang menyangkut syari’at Islam dimuat dalam Qanun. Hukum materiil yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam

⁴⁷ Indonesia, *Tap MPR RI, Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999 beserta Perubahan Pertama atas UUD Negara RI Tahun 1945*, (Jakarta: BP Panca Usaha. 1999) h. 64.

⁴⁸ Marzuki Abubakar, “Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama, *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*”, h 156.

bidang jinayah adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan syari'at Islam yang akan diatur dengan Qanun. Dalam Qanun ketentuan pidana terhadap perbuatan pidana disebut dengan ketentuan uqubah/uqubat.⁴⁹

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'ah dan akhlak (Pasal 125 ayat (1)). Syariat Islam tersebut meliputi ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Ketentuan mengenai pelaksanaan Syariat Islam diatur dengan Qanun. Adapun yang dimaksud dengan Qanun, dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 18 Tahun 2001, dikatakan bahwa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Jadi, Qanun adalah peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lege generalis* dan MA berwenang melakukan uji materil terhadap Qanun.⁵⁰

⁴⁹ Puteri Hikmawati, "Relevansi Pelaksanaan Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dengan Hukum Pidana Nasional", *Kajian*, Vol 14, No. 2, Juni 2008, h, 71.

⁵⁰ Puteri Hikmawati, "Relevansi Pelaksanaan Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dengan Hukum Pidana Nasional", h, 72.

E. Daftar Pustaka

- Abubakar, Marzuki, “Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial” *Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama*.
- Adnan Amal, Taufik dan Panggabean, Samsu Rizal, *Politik Syarit Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Alvabet, 2004).
- Ali, Achmad , *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undangundang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana: 2009).
- Baihaqi, Aulia, *Wajah Syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah*, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=29076>.
- Crisis Group, *Syari’at Islam dan Peradilan Pidana di Aceh*, Asia Report N’11 , 31 Juli 2006 Human Right Watch, *Menegakkan Moralitas*, <http://m.hrw.org/reports/2010/12/01/menegakkan-moralitas>.
- Denis Lombard, *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda*.
- Hadi, Ainal, *Hukum dan Fenomena Sosial*, Aceh Justice Resource Centre.
- Hamdani, *Apa Kabar Penerapan Syariat Islam di Aceh?*. <http://regional.kompasiana.com/2013/08/29/apa-kabar-penerapan-syariat-islam-di-aceh-584954.html>.
- Human Right Watch, *Menegakkan Moralitas, Pelanggaran Dalam Penegakan Syariat Islam di Aaceh, Indonesia*.
- Ismail, Nurjannah, *Syari’at Islam dan Keadilan Gender*, First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies.
- Ismail Yusanto, Muhammad, Kertas di baca pada, *Penerapan syariat Islam di Indonesia: Tantangan dan Agenda*.
- Kusnadi, Didi, kertas dibaca pada artikel pdf, *Hukum Islam Di Indonesia:Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum*.
- Missbach, Antje, *Separatist Conflict In Indonesia: The long-distance of the Acehnese Diaspra*, (London ang Nouyork: Reutledge,2012).

- Muhammad, Rusdi Ali, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi, Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: Logos, 2003).
- Rizani, Rasyid, *Kertas Dibaca Pada Kedudukan Qanun Jinayat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Hukum Nasional*.
- Roslaili, Yuni *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia: Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Disertasi SPS UIN Jakarta: 2009).
- Saidurrahman, *Annual Conference On Islamic Studies Banjarmasin, 1 – 4 November 2010 (ACIS) Ke – 10, Siyasah Syar'iyah Di NAD: Sejak Kemerdekaan RI Hingga Lahirnya UU No: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*.
- Suaedy, Ahmad, *Syariat Islam dan Tantangan Demokrasi di Indonesia, The 9th Conference of The Asia Pacific Sociological Association, Improving the Quality of Social Life: A Challenge for Sociology, June 13 – 15, 2009, Discovery Kartika Plaza, Kuta, Bali, Indonesia*.
- Umar, Muhammm, *Peradaban Aceh: Kilasan Sejarah Aceh dan Adat, Tamaddun I*, (Banda Aceh, Yayasan Busafat, 2006).
- Ibrahim, Armia, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, <http://Www.Ms-Aceh.Go.Id/Informasi-Umum/Artikel/120-Peraturan-Perundang-Undangan-Tentang-Pelaksanaan-Syariat-Islam-Di-Aceh.Html>.
- Perda No. 33 Tahun 2001, *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam di Nad*.
- Saidurrahman, “*Siyasah Syar'iyah Di Nad, (Sejak Kemerdekaan Ri Hingga Lahirnya UU No: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)*”, *Annual Conference On Islamic Studies Banjarmasin, 1 – 4 November 2010 (Acis) Ke – 10*
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah
- Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

Human Rights Watch, Menegakkan Moralitas, *Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia*.
<http://www.hrw.org/fr/node/94464/section/6>

Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

Tap MPR RI, Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999 beserta Perubahan Pertama atas UUD Negara RI Tahun 1945, (Jakarta: BP Panca Usaha. 1999).

Hikmawati, Puteri, “*Relevansi Pelaksanaan Syari’at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dengan Hukum Pidana Nasional*”, *Kajian*, Vol 14, No. 2, Juni 2008.